

# Determinan Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

**Darwin Hartono**

Universitas Indraprasta PGRI

---

**ARTICLE INFO****Article History:**

Received: 17 Juni 2022

Revised: 23 Juni 2022

Accepted: 14 Juli 2022

---

**Keywords:**

Human Development;

Poverty;

Open Unemployment;

Economic Growth;

Government Expenditure.

---

**ABSTRACT**

The background of this research is the inequality of human development in regencies/cities in 2008 to 2012. Thus, the purpose of this research is to analyze the factors influencing of human development as well as the role of local governments and private sectors towards human development in regencies/cities. The method of analysis used is Data Panel Regression with Fixed Effect approach using Eviews 6.0 application. The result of this research show that human development influenced by poverty, Gini index, private investment, open unemployment, economic growth, expenditure of education function and expenditure of health function. Private investment, expenditure of education function and expenditure of health function have a positive significant. Poverty, Gini index, open unemployment and economic growth have a negative significant. The role of local government through expenditure of education function is very large. The role of local government through expenditure of health function has not been too immense. The private sector's role through private investment is quite large.

Latar belakang penelitian ini adalah ketimpangan pembangunan manusia di kabupaten/kota pada tahun 2008 hingga 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia serta peran pemerintah daerah dan sektor swasta terhadap pembangunan manusia di kabupaten/kota. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Panel Data dengan pendekatan Fixed Effect menggunakan aplikasi Eviews 6.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia dipengaruhi oleh kemiskinan, indeks Gini, investasi swasta, pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran fungsi pendidikan dan pengeluaran fungsi kesehatan. Investasi swasta, pengeluaran fungsi pendidikan dan pengeluaran fungsi kesehatan memiliki signifikan positif. Kemiskinan, indeks Gini, pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi memiliki signifikan negatif. Peran pemerintah daerah melalui pengeluaran fungsi pendidikan sangat besar. Peran pemerintah daerah melalui pengeluaran fungsi kesehatan belum terlalu besar. Peran sektor swasta melalui investasi swasta cukup besar.



© 2022 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

**Corresponding Author:**

Darwin Hartono,

Email: [darwinhartono.state@gmail.com](mailto:darwinhartono.state@gmail.com)

---

**How to Cite:** Hartono, D. (2022). Determinan Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio e-Kons*, 14 (02), 155-164

---

## PENDAHULUAN

Memasuki dekade 1960an akhir hingga awal dekade 1970an, muncullah gagasan paradigma pembangunan ekonomi baru dengan tidak menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tinggi saja tetapi bagaimana mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta menciptakan pembangunan manusia. Dengan paradigma pembangunan baru tersebut memposisikan manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan ekonomi itu sendiri sehingga mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah maupun negara

(Todaro dan Smith, 2006). Dengan kata lain, pembangunan manusia mutlak dilakukan dalam proses pembangunan ekonomi dan tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia tersebut yaitu angka Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia, terbagi atas 29 kabupaten dan enam kota. Dengan banyaknya jumlah kabupaten/kota, tentu memberikan gambaran beragam mengenai pembangunan manusia di tiap daerah. Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2008 sebesar 71,60 meningkat menjadi 73,36 di tahun 2012 dan selalu berada diatas IPM nasional.

Akan tetapi, perkembangan peningkatan IPM tersebut berfluktuatif, dimana pada tahun 2010 merupakan peningkatan paling rendah sebesar 0,39 poin dan tahun 2008 merupakan peningkatan paling tinggi sebesar 0,68 poin. Dibandingkan dengan nasional, maka posisi IPM Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun selalu berada di atas IPM nasional. Berikut gambaran IPM kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 hingga 2012 pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.  
IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Kab. Cilacap*	70.9	71.39	71.73	72.34	72.77
2.	Kab. Banyumas	71.8	72.27	72.60	72.96	73.33
3.	Kab. Purbalingga*	70.9	71.51	72.07	72.50	72.97
4.	Kab. Banjarnegara*	69.0	69.63	69.91	70.39	70.70
5.	Kab. Kebumen*	70.2	70.73	71.12	71.62	71.86
6.	Kab. Purworejo**	71.3	71.88	72.55	72.91	73.53
7.	Kab. Wonosobo*	69.5	70.08	70.52	71.06	71.45
8.	Kab. Magelang*	71.4	71.76	72.08	72.69	73.14
9.	Kab. Boyolali*	70.0	70.44	70.72	71.25	71.50
10.	Kab. Klaten	72.9	73.41	73.83	74.10	74.46
11.	Kab. Sukoharjo	73.0	73.29	73.57	73.97	74.21
12.	Kab. Wonogiri*	70.5	71.04	71.33	71.86	72.59
13.	Kab. Karanganyar	72.2	72.55	73.19	73.82	74.62
14.	Kab. Sragen*	69.6	70.27	71.00	71.33	71.85
15.	Kab. Grobogan*	70.2	70.60	70.83	71.27	71.77
16.	Kab. Blora*	69.6	70.14	70.61	71.25	71.49
17.	Kab. Rembang*	71.1	71.55	72.07	72.45	72.81
18.	Kab. Pati	72.3	72.72	72.96	73.49	73.81
19.	Kab. Kudus	72.0	72.57	72.95	73.24	73.69
20.	Kab. Jepara	71.9	72.45	72.64	73.12	73.54
21.	Kab. Demak	71.6	72.10	72.58	73.09	73.52
22.	Kab. Semarang	73.3	73.66	74.10	74.45	74.98
23.	Kab. Temanggung	73.4	73.85	74.11	74.47	74.74
24.	Kab. Kendal*	69.4	70.07	70.41	70.85	71.48
25.	Kab. Batang*	69.2	69.84	70.41	71.06	71.41
26.	Kab. Pekalongan*	70.3	70.83	71.40	71.86	72.37
27.	Kab. Pemasangan*	68.4	69.02	69.89	70.22	70.66
28.	Kab. Tegal*	69.5	70.08	70.59	71.09	71.74
29.	Kab. Brebes*	67.1	67.69	68.20	68.61	69.37
30.	Kota Magelang	76.1	76.37	76.60	76.83	77.26
31.	Kota Surakarta	77.2	77.49	77.86	78.18	78.60
32.	Kota Salatiga	75.8	76.11	76.53	76.83	77.13
33.	Kota Semarang	76.5	76.90	77.11	77.42	77.98
34.	Kota Pekalongan	73.5	74.01	74.47	74.90	75.25
35.	Kota Tegal	73.2	73.63	73.89	74.20	74.63
Provinsi Jawa Tengah		71.60	72.10	72.49	72.94	73.36

Sumber: (BPS Jateng, 2013).

\*dibawah IPM provinsi 5 tahun berturut-turut

\*\*dibawah IPM provinsi 3 tahun

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa masih terjadi ketidakmerataan pembangunan manusia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada dibawah IPM provinsi. Dalam lima tahun tersebut, rata-rata terdapat 19 kabupaten/kota berada dibawah indeks pembangunan manusia provinsi atau 54,3 persen IPM kabupaten/kota lebih rendah dibanding IPM provinsi. Tinggi rendahnya angka IPM suatu daerah erat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal pemerintah daerahnya terkait aspek pembangunan manusianya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi indeks pembangunan manusia tersebut. Menurut UNDP, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki hubungan keterkaitan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka meningkatkan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan sumberdaya bersamaan dengan alokasi sumberdaya yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas mendorong pembangunan manusia menjadi lebih baik (Primandari, 2019). Kemiskinan dapat memberikan dampak cukup serius bagi pembangunan manusia, bermula dari ketidakmampuan daya beli masyarakat mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan dan menjadikan pembangunan manusia semakin memburuk (Dewi, 2017). Pengangguran terbuka dapat menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal. Saat tingkat pengangguran terbuka tinggi maka pendapatan masyarakat berkurang dan daya beli masyarakat menurun. Di sisi lain, pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia tidak terpenuhi, masyarakat tidak mendapatkan kehidupan layak dan pada akhirnya pembangunan manusia tidak terlaksana dan memburuk (Ayub, 2018).

Faktor lain berikutnya yang dapat memengaruhi pembangunan manusia yaitu investasi swasta dan investasi pemerintah. Adanya belanja fungsi pendidikan maka fasilitas dan pelayanan pendidikan akan meningkat yang berdampak pada akses pendidikan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka pengetahuan dan keahlian ikut meningkat dan mendorong peningkatan produktivitas. Pada akhirnya masyarakat memperoleh kesejahteraan yang lebih baik terlihat dari peningkatan kemampuan, pendapatan maupun konsumsinya sehingga menciptakan pembangunan manusia yang berkelanjutan (Laode et al, 2020). Sedangkan dengan adanya belanja fungsi kesehatan maka akan terdapat fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai guna mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Derajat kesehatan yang tinggi menghasilkan kualitas manusia lebih baik dengan tingkat mental maju dan kemampuan berproduktivitas lebih baik. Dengan begitu maka masyarakat menjadi sehat sejahtera dan pembangunan manusia menjadi lebih baik (Muliza, 2017). Adanya investasi swasta pada sumber daya manusia mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih produktif. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan sehingga mampu mensejahterahkan dirinya sendiri (Nisa, 2021). Faktor lain berikutnya yang dapat memengaruhi pembangunan manusia ialah distribusi pendapatan. Ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat miskin semakin tergerus kesejahteraan hidupnya karena tidak dapat menikmati hasil pembangunan dan tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya sehingga pembangunan manusia tidak berjalan dengan baik atau semakin buruk (Yanthi, 2022).

## **METODE**

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan pembangunan manusia sebagai variabel dependen dan variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran terbuka, investasi swasta, belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan indeks Gini sebagai variabel independen. Adapun sumber data diperoleh dari data resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Definisi operasional masing-masing variabel sebagai berikut:

- Indeks pembangunan manusia adalah indeks komposit guna mengukur pencapaian atau keberhasilan pembangunan manusia di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang di ukur dalam satuan indeks dari periode tahun 2008-2012.
- Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kenaikan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan persen dari periode tahun 2008-2012.
- Kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan persen dari periode tahun 2008-2012.
- Pengangguran terbuka adalah jumlah penduduk yang sama sekali tidak bekerja di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan persen dari periode tahun 2008-2012.
- Investasi swasta adalah realisasi total investasi swasta di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan miliar rupiah dari periode tahun 2008-2012.
- Belanja fungsi pendidikan adalah realisasi anggaran belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan puluhan miliar rupiah dari periode tahun 2008-2012.
- Belanja fungsi kesehatan adalah realisasi anggaran belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan puluhan miliar rupiah dari periode tahun 2008-2012.
- Indeks Gini adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan indeks dari periode tahun 2008-2012.

Dengan metode analisis tersebut maka persamaan fungsi linearnya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 KMSKN_{it} + \beta_3 PT_{it} + \beta_4 IS_{it} + \beta_5 BFPNDKN_{it} + \beta_6 BFKSHTN_{it} + \beta_7 IG_{it} + \epsilon_{it}$$

dimana:

$Y_{it}$	= indeks pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$\alpha$	= konstanta indeks pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$\beta_1$	= koefisien regresi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$PE_{it}$	= pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$\beta_2$	= koefisien regresi kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$KMSKN_{it}$	= kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$\beta_3$	= koefisien regresi pengangguran terbuka kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$PT_{it}$	= pengangguran terbuka kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$\beta_4$	= koefisien regresi investasi swasta kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$IS_{it}$	= investasi swasta kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$\beta_5$	= koefisien regresi belanja fungsi pendidikan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$BFPNDKN_{it}$	= belanja fungsi pendidikan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$\beta_6$	= koefisien regresi belanja fungsi kesehatan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$BFKSHTN_{it}$	= belanja fungsi kesehatan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$\beta_7$	= koefisien regresi Indeks Gini kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$IG_{it}$	= Indeks Gini kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
$\epsilon_{it}$	= variabel pengganggu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Terdapat dua model pendekatan yaitu pendekatan Fixed Effect dan pendekatan Random Effect. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan model terbaik. Untuk memilih model pendekatan yang tepat maka dilakukan uji Hausman dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.  
Hasil Uji Hausman

Chi Square uji Hausman	Chi Square tabel dengan df=7	Kesimpulan
33,263887	14,067	pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan fixed effect

Sumber: (Data diolah, 2022).

Dari Tabel 2 diperoleh nilai Chi Square Uji Hausman sebesar 33,263887 lebih besar daripada nilai Chi Square tabel (df=7) sebesar 14,067. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang terbaik adalah pendekatan Fixed Effect. Hasil regresi data panel determinan pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3.  
Hasil Regresi Data Panel Pendekatan *Fixed Effect* Determinan Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012

Variabel	Koefisien	Nilai t hitung	t Prob.
C	76,79445	217,0954	0,0000
PE	-0,352953	-2,956442	0,0035
KMSKN	-2,765578	-13,54922	0,0000
PT	-0,377346	-25,87184	0,0000
IS	1,239495	25,91060	0,0000
B_F_PNDKN	0,069777	2,337614	0,0205
B_F_KSHTN	0,037264	9,462379	0,0000
IG	-1,721333	-21,45369	0,0000
<i>Fixed Effects</i>			
R Squared	0,984450	Durbin Watson stat	1,974678
Adjusted R Squared	0,970150		
F-statistic	214,9545		
Prob (F-statistic)	0,000000		

Sumber: (Data diolah, 2022).

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa persamaan regresi data panel pendekatan Fixed Effect determinan pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

$$IPMit = 76,79445 - 0,352953PEit - 2,765578KMSKNit - 0,377346PTit + 1,239495ISit + 0,069777BFPNDKNit + 0,037264BFKSHTNit - 1,721333IGit$$

## Pembahasan

Pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yg dilakukan oleh Herman (2018) dan Noviantara et al (2019) dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Primandari (2019) yang secara empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan teori, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka meningkatkan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan sumberdaya bersamaan dengan alokasi sumberdaya yang tepat dan distribusi peluang yang semakin luas khususnya kesempatan kerja mendorong pembangunan manusia lebih baik (Primandari, 2019). Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki dampak negatif signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan dijadikannya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah kurang berjalan optimal dan merata. Hal ini dibuktikan dari sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dimana sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Itu berarti masyarakat yang bekerja pada industri tersebut yang menikmati

pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Menurut Adelman dan Morris (1973) dalam Kuncoro (2006) pertumbuhan ekonomi dengan pola sektor industri lebih dominan atau memberikan sumbangan terbesar pada pertumbuhan ekonomi umumnya akan diikuti ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar daerah.

Kedua, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) dan Fadilla et al (2020) yang secara empiris menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan teori, pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup seperti hidup panjang umur (*longevity*), hidup sehat (*healty life*), mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan memiliki akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup dimana ketiga dimensi tersebut termasuk ke dalam permasalahan kemiskinan. Itu berarti jika dimensi pembangunan manusia terpenuhi maka kemiskinan teratasi atau berkurang sehingga pembangunan manusia meningkat (Todaro, 2010). Pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dimensi pembangunan manusia bagi penduduk miskin sudah dapat terpenuhi. Hal itu tentu berdampak kepada penurunan jumlah penduduk miskin sehingga meningkatkan IPM kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga 2012. Beberapa dimensi pembangunan manusia tersebut antara lain dalam komponen seperti kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita bagi penduduk miskin yang mengalami peningkatan sehingga pembangunan manusia menjadi lebih baik.

Ketiga, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayub (2018) dan Purbaningtyas et al (2020) yang secara empiris menunjukkan bahwa pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan teori, Todaro (2000) berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri. Dengan teratasinya jumlah pengangguran maka masyarakat memiliki pekerjaan dan mendapatkan pendapatan yang mencukupi sehingga terjadi peningkatan pengeluaran yang dibelanjakan seperti makanan yang lebih bergizi, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Dengan peningkatan kualitas pengeluaran maka semakin meningkat pula komponen yang ada di dalam pembangunan manusia sehingga pembangunan manusia menjadi lebih baik. Pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kecenderungan menurun yang berarti semakin meningkatnya angkatan kerja yang terserap di pasar kerja dan masyarakat yang memiliki pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja kabupaten/kota diikuti peningkatan rasio rata-rata upah minimum kabupaten/kota dibanding dengan standar kebutuhan hidup layak (KHL).

Keempat, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asiri et al (2016), Pambudi (2019) dan Nisa (2021) yang secara empiris menunjukkan bahwa investasi swasta memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan teori, investasi pada sumber daya manusia mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih produktif. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia menjadikan manusia memiliki banyak pilihan sehingga berusaha menciptakan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Adanya investasi swasta bersifat padat karya juga ikut memengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan investasi tersebut menyerap lebih banyak jumlah tenaga kerja. Masyarakat yang sebelumnya menganggur menjadi memiliki pekerjaan dan pendapatan sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu, investasi berorientasi sosial pada akhirnya juga ikut meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga pembangunan manusia menjadi lebih baik. Investasi swasta pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami kecenderungan meningkat dari tahun 2008 sebesar Rp 725.645.888.259,00 menjadi Rp 1.668.052.641.226,00 di tahun 2012. Investasi swasta yang terdapat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan bersifat padat karya.

Kelima, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel belanja fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khikmah (2019) dan Laode et al (2020) yang secara empiris menunjukkan bahwa belanja fungsi pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan teori, peranan pemerintah melalui belanja fungsi pendidikan berdampak pada peningkatan fasilitas dan pelayanan pendidikan agar mencapai pendidikan lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan maka pengetahuan dan keahlian ikut meningkat sehingga mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Pada akhirnya dengan produktivitas tinggi memperoleh kesejahteraan lebih baik yang diperlihatkan melalui peningkatan kemampuan, pendapatan maupun konsumsinya sehingga menciptakan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Belanja fungsi pendidikan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan hingga ke daerah. Adanya belanja fungsi pendidikan maka memperbesar akses terhadap pendidikan sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan yang diterima masyarakat. Belanja fungsi pendidikan pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah lebih banyak dipergunakan untuk prasarana dan sarana pendidikan.

Keenam, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliza (2017) dan Khikmah (2019) yang secara empiris menunjukkan bahwa belanja fungsi kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan teori, kesehatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya peranan pemerintah melalui belanja fungsi kesehatan maka terdapat fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai guna mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Derajat kesehatan yang tinggi menghasilkan kualitas manusia lebih baik dengan tingkat mental maju dan kemampuan berproduktivitas yang tinggi. Dengan hal tersebut masyarakat menjadi lebih sejahtera dan pembangunan manusia pun ikut menjadi lebih baik. Belanja fungsi kesehatan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat hingga ke daerah. Adanya belanja fungsi kesehatan maka meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai guna mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi masyarakat.

Ketujuh, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel indeks Gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irajya (2017), Pratowo (2019) dan Yanthi (2022) yang secara empiris menunjukkan bahwa indeks Gini memiliki pengaruh negatif terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan teori, distribusi pendapatan memiliki dampak kuat pada pembangunan manusia. Dengan adanya distribusi pendapatan yang merata maka masyarakat golongan menengah dan bawah dapat ikut menikmati hasil pembangunan. Distribusi pendapatan juga turut menentukan pengeluaran rumah tangga yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Saat distribusi pendapatan buruk, banyak rumah tangga akan mengurangi pengeluaran berbiaya besar seperti pendidikan, kesehatan dan makanan bergizi dan lebih banyak ditujukan sesuai dengan pendapatan yang ada. Indeks Gini kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga 2012 berada pada interval 0,245 hingga 0,397. Bila dikategorikan, ketimpangan pendapatan yang terjadi di kabupaten/kota berada dalam kategori ketimpangan rendah dan sedang. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi pada kabupaten/kota secara umum tidak terlalu timpang atau pendapatan yang diterima masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok pendapatan relatif tidak mempunyai perbedaan yang begitu tajam walaupun tetap diperlukan perhatian dikarenakan indeks Gini yang terjadi memiliki kecenderungan meningkat beberapa tahun terakhir.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai dengan 2012 dipengaruhi oleh variabel kemiskinan, indeks gini, investasi swasta, pengangguran terbuka,

pertumbuhan ekonomi, belanja fungsi pendidikan dan belanja fungsi kesehatan. Variabel investasi swasta, belanja fungsi pendidikan dan belanja fungsi kesehatan memiliki pengaruh searah. Sementara variabel kemiskinan, indeks gini, pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh tidak searah.

Peran pemerintah daerah melalui belanja fungsi pendidikan sangat besar terlihat dari APS, AMH dan RLS kabupaten/kota meningkat. Peran pemerintah daerah melalui belanja fungsi kesehatan belum terlalu besar dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian balita dan angka kematian bayi walaupun angka harapan hidup meningkat dan angka prevalensi gizi buruk menurun. Sedangkan peran swasta melalui investasi swasta cukup besar terlihat dari besarnya jumlah penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya pengeluaran per kapita disesuaikan.

## Saran

Pertumbuhan ekonomi dan indeks Gini berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia maka pemerintah kabupaten/kota sebaiknya menggiatkan program pembangunan ekonomi berbasis pada manusia (human development) seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Desa Wisata agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia maka pemerintah kabupaten/kota sebaiknya menjaga trend penurunan dengan pendampingan terhadap keluarga keluarga miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) di tiap kabupaten/kota.

Pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia maka pemerintah kabupaten/kota sebaiknya menurunkan pengangguran terbuka dengan program lapangan kerja yang memperhatikan teknologi sederhana mengingat angkatan kerja didominasi pendidikan rendah dan mengusahakan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan kebutuhan hidup layak (KHL) sehingga tenaga kerja dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Investasi swasta berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia maka pemerintah kabupaten/kota perlu mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global dan memperkaya pembangunan industri berbasis padat karya, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tiap kabupaten/kota.

Belanja fungsi pendidikan berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia maka pemerintah kabupaten/kota sebaiknya mengarahkan alokasi belanja fungsi pendidikan kabupaten/kota pada bidang pendidikan menengah (umum dan kejuruan) dan tinggi (universitas) agar masyarakat dapat mengakses pendidikan ke jenjang lebih tinggi untuk dapat meningkatkan produktivitas dan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.

Belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia maka pemerintah kabupaten/kota sebaiknya meningkatkan keaktifan dan jumlah rasio Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada kabupaten/kota agar dapat menekan resiko kematian balita, bayi dan ibu saat melahirkan.

## REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

- Asiri, A. A. A., Masinambow, V. A. J., Wauran, P.C. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja Di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2003-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 334-347.
- Ayub, M. (2018). Pagaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. *Jurnal UIN Sulthan Thata Saifuddin*, 1(1), 90-99.
- BPMD Jateng. (2013). *Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Badan Penanaman Modal Daerah.

- BPS Indonesia. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- BPS Jateng. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_. (2013). Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_. (2013). Profil Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *JOM Fekon*, 4(1), 870-882.
- Fadila, R., Marwan. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *ECOGEN: Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 120-133.
- Herman. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau (STIER)*, 1(1), 182-189.
- Irijaya, R. (2017). Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin dan Gini Ratio Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014. *Jurnal Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1(1), 1-10.
- Kemendagri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kemenkeu Indonesia. (2013). Data Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
- Khikmah, Z., Sarfiah, S. N., Prasetyanto, P. K. (2019). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap IPM Di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(4), 1127-1142.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi 4. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Laode, M., Engka, D. S. M., Sumual, J. L. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02), 58-67.
- Muliza, Zulham, T., Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam*, 3(1), 51-69.
- Nisa, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah Tahun 2012-2018. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1), 2337-3814.
- Noviatamara, A., Ardina, T., Amalia, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 53-60.
- Pambudy, A.P., Syairozi, M. I. (2019). Analisis Peran Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal EKOBIS*, 20(1), 26-39.
- Pratowo, N. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, 1(1), 15-31.
- Primandari, N. R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2004-2018. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 26-34.
- Purboningtyas, I., Sari, I. R., Guretno, Tian., Dirgantara, A., Agustina, D., Haris, M. A. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap

- Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Saintika UNPAM: Jurnal Sains dan Matematika UNPAM*, 3 (1), 81-88.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Alih Bahasa: Munandar dan Puji. Jakarta: Erlangga.
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development*. UNDP.
- Yanthi, N. P. S. P. (2022). Pengaruh IPM Dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 20(5), 2193-2222.